

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam buku I Wibowo dan Syamsul Hadi “*Embracing China: Post-Soeharto Indonesia-China Relations*”, berisikan kutipan-kutipan dari pakar perpolitikan dan perekonomian yang menguraikan perjuangan dan kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan negara Indonesia dalam membentuk interaksi perekonomian dengan Cina dengan sarana strategi perjanjian kerjasama.

Dalam buku ini, penulis membahas tentang upaya Indonesia untuk menjalin kembali hubungan ekonomi dan politik dengan Cina dalam rangka memajukan operasi kenegaraan kedua negara. Berdasarkan hal tersebut, penulis buku ini membahas mengenai dinamika perkembangan ekonomi yang telah dicapai negara Indonesia sejak melanjutkan hubungan dengan Cina, dari periode orde lama hingga pasca orde baru.²³

Buku ini juga meliputi berbagai pandangan yang di gunakan dalam mendeskripsikan histori serta dinamika peningkatan hubungan diplomatik antara Indonesia-Cina. Beberapa menggunakan perspektif liberalis yang memberi dukungan adanya perniagaan bebas di Asia dengan sarana kesepakatan kemitraan strategis namun ada pula beberapa ahli yang menggunakan perspektif merkantilis dengan menghitung serta

²³ I. Wibowo dan Syamsul Hadi, “*Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*”. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

menganalisis untung dan rugi yang akan dialami oleh pemerintah Indonesia apabila membentuk ikatan kerjasama bilateral dengan Cina.

Melalui perbedaan perspektif yang teruraikan pada topik yang sama inilah yang menjadikan buku tersebut sebagai bahan pertimbangan atas permasalahan negara Indonesia yang berminat untuk menjalin interaksi baik dengan Cina dengan sarana kemitraan internasional yang strategis antar kedua negara demi kepentingan yang sama yakni memajukan perekonomian domestik masing-masing negara.

Buku yang di karang oleh Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra, yang berjudul *Garuda Terbelit Naga : Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia*. Pada buku ini, di deskripsikan bagaimana pengaruh positif maupun negatif yang diterima oleh pemerintah Indonesia.

Sisi positifnya, pemerintah Indonesia semakin bersemangat untuk menciptakan dan memasarkan barang-barang asli untuk di ekspor. Di sisi lain, karena Cina membeli hampir seluruh bahan baku Indonesia dengan tarif rendah kemudian menjual produknya dengan harga dua kali lipat, Tiongkok mampu memegang kunci kelemahan negara Indonesia yaitu bahan baku yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk diolah menjadi produk jadi²⁴.

²⁴ Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra, “ *Garuda Terbelit Naga: Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia*. Menteng, Jakarta Pusat : Institute for Global Justice. 2006

Oleh karena itu, karya tulis ini memberikan arahan akurat dalam bagaimana mengambil tindakan akan keberhasilan ekonomi negara Cina dengan tetap mempertimbangkan berbagai permasalahan dan potensi yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memajukan standarisasi barang lokal ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, dengan menjadikan Cina sebagai perbandingan, Indonesia akan mampu mendidik diri sendiri bagaimana tumbuh dari negara berkembang menjadi negara maju di masa depan, bukan menjadi negara yang terus bergantung pada negara maju lainnya.

Kemudian terdapat skripsi yang ditulis oleh Michella Desri Viollita yang berjudul *Dampak Peningkatan Ekonomi Indonesia Melalui Deklarasi Kemitraan Strategis Dengan Cina Tahun 2005-2011*. Dalam kajiannya berupaya mempelajari upaya Indonesia untuk memperkuat perekonomiannya melalui kerjasama dengan Cina di bidang penanaman modal asing, minyak, dan gas. Berdasarkan temuan dalam penelitiannya, pengaruh dan dampak kerjasama perdagangan yang dilakukan Indonesia dan Cina melalui perjanjian hubungan bilateral Indonesia-Cina mampu meningkatkan perekonomian kedua negara. Pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia terhadap terciptanya kemitraan strategis dengan China antara tahun 2005 dan 2011 turut dikaji dalamnya.

Strategi ini memiliki arti tersendiri dalam hal memperbaiki hubungan diplomatik kedua bangsa, yang terjadi setelah hubungan diplomatik dihentikan pada masa orde lama. Menurut perspektif liberal penelitian tentang ekonomi politik internasional ini, negara Indonesia

berusaha untuk melakukan pertukaran antara individu dalam ekonomi lokal dan asing untuk menciptakan keadaan ekonomi yang bebas dan tidak terkendali.

Penelitian tersebut menghasilkan bahwasanya akibat dari meningkatnya interaksi kemitraan dengan Tiongkok dapat memberi keuntungan atas sektor ekonomi-perdagangan di negara Indonesia. Namun setelah tahun 2011 keuntungan yang dirasakan negara Indonesia kian menurun. Hal ini disebabkan adanya perselisihan domestik terkait dengan penerapan perjanjian tersebut.

Ketiga penelitian tersebut yang menjadi sumber acuan dalam penulisan skripsi ini, yang membedakannya yaitu adanya studi kasus konflik laut Natuna serta pengaruhnya terhadap hubungan kerjasama ekonomi yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur jalur daratan dan lautan melalui kerjasama ekonomi *belt and road initiative* yang kemudian berfokus pada masa pemerintahan Joko Widodo. Dengan begitu terbentuklah 2 fenomena yang bertolak belakang yakni konflik kedaulatan dan kerjasama perekonomian.

Selain itu, penulis juga menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia mendekati diri melalui kerjasama Internasional namun tetap menjaga agar tidak terjadi ketergantungan terhadap perekonomian nasional Cina tanpa menyinggung fenomena kalam yang pernah terjadi sebelumnya.

2.2 Tinjauan Teori

Studi tentang sebab-sebab konflik dan kondisi-kondisi yang mendorong kerjasama merupakan inti dari teori hubungan internasional. Teori kerjasama dan konflik adalah fondasi utama untuk pemahaman lengkap tentang urusan internasional. Konflik tidak dapat terpisahkan dari hubungan internasional.

Konflik itu sendiri merupakan salah satu fenomena hubungan internasional. Esensi konflik dan resolusi konflik adalah hubungan sebab akibat yang merupakan satu kesatuan. Resolusi konflik adalah istilah ilmiah yang mengutamakan kepentingan yang melihat dunia sebagai sarana terbuka dan membentuk proses resolusi konflik menjadi beberapa tahapan yang disesuaikan dengan dinamika perputaran konflik.

Dalam kajian hubungan internasional, fenomena tersebut merupakan fenomena konflik atau pertentangan yang muncul antar negara. Dikarenakan adanya konflik, negara atau subyek hubungan internasional dalam hal ini adalah aktor-aktor (state atau non-state) menyadari bahwa hubungan internasional harus berkembang sebagai jalan menuju perdamaian.

Konflik berasal dari kata kerja latin “conflict” yang artinya melawan. Konflik wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikan suatu kawasan atau perbatasan antara 2 negara atau lebih yang sering kali terjadi karena memiliki hubungan atas kepemilikan kekayaan alam seperti sungai, tanah yang sangat produktif, sumber air dan minyak serta kekayaan

maritim. Konflik internasional ialah salah satu konflik yang sering terjadi di dunia baik negara berkembang maupun negara maju sehingga permasalahan ini bisa membentuk perang besar yang akan merugikan banyak pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak.

Konflik merupakan suatu gejala sosial yang selalu muncul dalam kehidupan warga negara, baik dalam lingkup kecil seperti dalam keluarga maupun lingkup luas seperti dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik bersifat inheren artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung setiap saat. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan tiap individu.

Menurut Scannell konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi tiap tujuan atau nilai dalam sekelompok individu dan sudah biasa terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Webster menegaskan bahwa istilah “conflict” menurut bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan. Konflik adalah persepsi atau sudut pandang mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa aspirasi pihak-pihak

yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan karena adanya perbedaan-perbedaan.

Sementara itu menurut Dahrendorf konflik dapat dibedakan atas empat macam yakni pertama, konflik yang terjadi antara peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Setiap individu tentunya memiliki persamaan maupun perbedaan dalam menjalankan perannya sebagai salah satu anggota masyarakat. Terkadang dalam menjalankan peran tersebut terdapat perbedaan pendapat, perbedaan antara ekspektasi dan realita yang berujung pada konflik.

Kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Dalam suatu negara terdapat berbagai kelompok sosial yang hidup di dalamnya. Masing-masing kelompok tersebut memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda-beda, apabila adanya tujuan dan cara kerja yang berbeda tersebut tidak diintegrasikan dengan baik maka akan timbul konflik.

Ketiga, konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Konflik ini biasanya terjadi karena ketimpangan antarkelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir. Keempat, konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar daerah, antar negara, maupun organisasi internasional. Konflik-konflik seperti ini biasanya terjadi karena satu kelompok memandang bahwa kelompok yang lain menghambat dan merugikan kepentingannya.

Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam berbagai lini kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Miall bahwa resolusi konflik adalah istilah komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang dalam dan berakar akan diperhatikan dan diselesaikan. Pada hakikatnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang bermusuhan.

Sementara Askandar menyatakan bahwa resolusi konflik ini dijalankan untuk memberi penyelesaian yang diterima semua pihak meski dalam mekanisme akhirnya terdapat pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. Ini akan membuat mereka mempunyai kepentingan untuk memberikan penyelesaian yang diterima oleh semua pihak, dan yang dicapai oleh mereka sendiri.

Untuk membuat pihak yang terlibat konflik menerima penyelesaian tersebut, harus disadarkan bahwa mereka perlu untuk hadir dalam pembicaraan mengenai konflik dan lebih aktif lagi dalam proses perundingan untuk mencapai penyelesaian. Hal ini agar mereka mendapat gambaran yang lebih jelas lagi mengenai konflik tersebut, dari perspektif mereka atau perspektif lawan. Selain itu pula, mereka juga diharapkan dapat

melihat dengan lebih jelas lagi pilihan-pilihan yang ada, dan benar-benar menghargai pilihan akhir yang nantinya akan mereka terima.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara pihak-pihak yang berkonflik dengan atau tanpa bantuan pihak luar untuk menyelesaikan konflik. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk menjembatani dan membantu pihak-pihak yang berkonflik dalam memecahkan masalahnya dengan diutamakan cara yang damai.

Ralf Dahrendorf menjelaskan bahwa ada tiga bentuk manajemen konflik yang dapat dipakai sebagai sarana penyelesaian konflik, yaitu: Pertama konsiliasi, di mana semua pihak secara terbuka mendiskusikan dan berdebat untuk mencapai kesepakatan tanpa memonopoli atau memaksakan kehendak mereka pada kedua sisi.

Kedua Mediasi, di mana para pihak yang bersengketa setuju untuk meminta nasihat dari mediator yang ditunjuk yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni tentang apa yang dikendalikan; Ketiga melalui arbitrase, pihak yang bersitegang setuju untuk mencari penyelesaiannya melalui jalur hukum.

Mekanisme penyelesaian sengketa Darendof digunakan untuk menyelesaikan konflik Indonesia-China atas kedaulatan maritim di Natuna Utara dengan upaya diplomasi ekonomi, satu bentuk kerjasama ekonomi tersebut yaitu melalui kerjasama *Belt and Road Initiative*. Gagasan kemitraan strategis antara kedua negara terkait dengan jenis integrasi yang dicapai melalui pembicaraan dan pemanfaatan kerjasama perekonomian, perpolitikan, dan sosial budaya.²⁵ Pertanyaan esensial dalam kolaborasi internasional adalah seberapa jauh keuntungan yang dapat dicapai melalui kemitraan tersebut dapat mempertahankan gagasan kepentingan dalam aktivitas yang bersatu dan bersaing.

Beberapa gagasan analitis digunakan untuk menjelaskan penyebab kerjasama ekonomi Indonesia-Cina, *Belt and Road Initiative*, dan masalah perairan Natuna. Hubungan antar bangsa berkembang sebagai hasil dari strategi suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian guna mempertahankan tingkat kesetaraan sosial suatu negara dan memenuhi tuntutannya.

Namun, tidak semua tuntutan lokal dapat dipenuhi sehingga mengharuskan suatu negara untuk melakukan kerjasama bidang perekonomian dengan bangsa lain. Kerjasama perekonomian tidak serta merta hanya sekadar antar negara namun meluas ke daerah-daerah yang membentuk pasar tunggal.

²⁵ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar sosiologi: pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial teori aplikasi dan pemecahannya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Kerjasama internasional tidak hanya dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang tergabung dalam organisasi atau lembaga internasional. Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah dinamika kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.²⁶

Yang disebut dengan “kolaborasi internasional” dalam hubungan internasional adalah ketika kerjasama internasional memenuhi berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Pertanyaan penting dalam kerjasama internasional adalah seberapa jauh keuntungan yang akan diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mempertahankan gagasan kesatuan dan kepentingan tindakan yang bersaing.

Sebagian besar akademisi menangani kerjasama internasional dalam rancangan kelembagaan seperti rekan kerjasama, hukum laut, mitigasi lingkungan, dan langkah-langkah untuk mengurangi perselisihan antar negara. Menurut penelitian Lipson, potensi suatu negara untuk membentuk kerjasama dan mengorganisasikan kerjasama lebih terfokus pada sektor perekonomian daripada sektor keamanan.

Keohane mengacu pada “liberalisme institusional” yang mengacu pada potensi institusi internasional dalam mendorong kolaborasi dalam menghadapi tantangan perekonomian dan keamanan. Hingga kisaran tahun

²⁶ Koesnadi Kartasasmita, *Administrasi Internasional*, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977, hal. 19

2000, Haim menelaah mengenai implikasi jaringan rekan kerjasama pada sistem perdagangan internasional.

Penelitian **Gallop** berfokus pada berbagai variabel pembentukan kerjasama internasional, seperti fungsi institusi domestik dan kerentanan geografis, Warren mengkaji hubungan antara kerjasama dan demokrasi secara lebih mendalam. Dan memahami bahwa negara dengan perpolitikan dalam negerinya yang sama lebih suka saling membentuk kemitraan, dan negara-negara berdemokrasi sering kali membentuk kemitraan dengan baik.

Meski kedua belah pihak memiliki potensi yang besar, ada beberapa hambatan untuk membentuk kerjasama yang lebih *intens*. Sikap pemerintah atas kerjasama melalui *Belt and Road Initiative* mengarah pada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif berdasarkan falsafah pancasila dan kerangka konstitusional undang-undang dasar 1945. Artinya senantiasa bertindak sebagai mediator antara negara-negara yang bersitegang, bersifat netral, dan ikut serta dalam upaya membangun tatanan internasional.

Dapat disimpulkan bahwa kerjasama bilateral dilakukan oleh dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dan mencapai tujuan mereka. Argumennya adalah bahwa kerjasama internasional dapat dilihat sebagai upaya suatu negara untuk mengeksploitasi persyaratan negara atau pihak lain.

Dalam hubungan internasional, interaksi bilateral ada dalam dua konteks yang meliputi kolaborasi atau kerjasama dan konflik atau ketegangan. Dinamika hubungan internasional menyebabkan kedua *setting* hubungan internasional tersebut mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Bentuk kerjasama bilateral menentukan jenis interaksi dalam interaksi bilateral dalam topik kerjasama.

Kerjasama bilateral dapat didefinisikan sebagai adanya kepentingan yang mendasari perjanjian antara dua negara untuk bekerja sama di bidang tertentu dengan sarana dan dengan tujuan yang disepakati bersama. Tujuannya adalah untuk memupuk perdamaian melalui kolaborasi dalam sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi, yang menghasilkan hubungan yang lebih bersahabat antara kedua negara.

Pada dasarnya negara akan menjalin hubungan dengan negara lain dengan tujuan memenuhi kepentingan nasional negaranya yang tidak dapat terpenuhi di dalam negeri. Untuk itu suatu negara perlu mengutamakan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama dalam mempertemukan kepentingan antar negara²⁷. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya suatu kerjasama internasional sangat dibutuhkan bagi setiap negara.

Berdasarkan penggunaan konsep kerjasama internasional maka dalam penelitian ini juga akan menggunakan konsep kepentingan nasional. Menurut Hans J.Morgenthau dalam "*The Concept of Interest defined in*

²⁷ Syamsur Dam, *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan Dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal 15

Terms of power", konsep kepentingan nasional diuraikan dalam sebutan "power" yang berada diantara nalar, akal atau alasan yang berusaha untuk memahami perpolitikan internasional melalui fenomena-fenomena nyata yang harus ditelaah dan dipahami. Dengan kata lain, *power* merupakan instrumen yang penting dalam memperoleh kepentingan nasional.

Kepentingan nasional merupakan penopang penting dalam politik luar negeri dan politik internasional yang realistis karena kepentingan nasional mampu mempengaruhi perilaku perpolitikan suatu negara. Morgenthau mengklaim bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah untuk mengejar kekuasaan, yang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menciptakan dan mempertahankan pengaruh suatu negara atas negara lain.

Koneksi kekuatan atau kontrol ini dapat dibangun dengan pendekatan secara paksa atau secara kerjasama. Alhasil, Morgenthau menemukan istilah abstrak yang maknanya sulit dijelaskan, yaitu kekuasaan dan kepentingan, yang dilihatnya sebagai sarana sekaligus tujuan akhir dari aktivitas politik internasional.²⁸

Pengertian "geopolitik" yakni konsep hubungan internasional yang menegaskan bahwa suatu wilayah atau geografis memiliki pengaruh kunci dalam membentuk arah perpolitikan luar negeri suatu negara. Lokasi, wilayah, iklim, geografi, demografi, kekayaan alam, dan penggunaan ilmu pengetahuan atau teknologi merupakan faktor yang diutamakan.

²⁸ Hans J. Morgenthau, 1951, *In Defense of the National Interest*. A. Knopf. New York

Geopolitik melihat kekuatan suatu negara dari 2 perspektif: kekuatan darat dan kekuatan maritim.

Negara-negara dengan posisi kawasan yang strategis dan prospektif akan menjadikan politik luar negeri negaranya mengarah pada pertumbuhan lebih lanjut dan meningkatkan kualitas teritori serta negara-negara yang disekitarnya akan turut berupaya dalam mengambil keuntungan dari kawasan tersebut, baik melalui kerjasama dengan negara lain, pemilik daerah, serta melalui paksaan. Negara-negara yang memiliki kekuatan darat atau laut harus dapat menggunakan sumber dayanya dan menjadi pihak negosiasi yang lebih mendominasi dalam kolaborasi regional.

Geopolitik merupakan upaya perspektif yang digunakan untuk menelaah suatu peristiwa dalam interaksi internasional melalui konteks yang diberikan pada tempat geografis tertentu yang kemudian memiliki pengaruh yang sesuai fakta nyata. Lokasi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam geopolitik sebagai sebuah konstruksi sosial yang mendikte dan didikte kegiatan manusia.

Konsep geopolitik dimanfaatkan untuk memberi dan memahami konteks pada tempat-tempat geografis dan membentuk persepsi tertentu terhadapnya. Dinamika geopolitik di periode perang dingin dapat dilihat dari bagaimana istilah “Tirai Besi” digunakan untuk menciptakan separasi

dan mendefinisikan identitas-identitas tertentu berdasarkan geografi dan konteks politik yang disematkan padanya²⁹.

Secara geografis, *Belt and Road Initiative* merupakan program pemerintah Tiongkok yang bertujuan untuk memaksimalkan kembali jalur sutra daratan dan lautan guna meningkatkan kekuatan perpolitikan, perekonomian, dan sistem kemiliteran dalam interaksi internasional. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tercakup dalam jalur sutera kelautan atau maritim. Alhasil, pemerintah Tiongkok membutuhkan negara Indonesia yang memiliki wilayah kelautan yang sangat vital dan potensi yang sangat besar untuk melengkapi peta jalur sutera yang dibuatnya³⁰.

Dengan letak geografis Indonesia yang seperti itu memberikan keuntungan tersendiri ketika melakukan diplomasi dalam kerjasama ekonomi maupun perpolitikan dengan pemerintah Tiongkok. Kepentingan negara Indonesia berdasarkan geopolitiknya berupa kebijakan poros maritim dunia yang memiliki visi untuk mengoptimalkan kawasan kelautan dalam peningkatan kekuatan perekonomian, perpolitikan, maupun sistem kemiliteran begitu juga dengan kebijakan *Belt and Road Initiative Tiongkok*.

²⁹ Kusnanto Anggoro, *Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal*, Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi 29 | Maret 2017

³⁰ Iqbal Ramadhan. (2018). *China's belt Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik*. Intermestic: Journal of International Studies. Volume 2, no. 2 Mei 2018. issn.2503-443X

Tindakan yang dilakukan seringkali berupa kerjasama atau investasi dengan posisi negosiasi yang tidak setara, dimana negara penanam modal memberikan tekanan kepada negara penerima untuk mentaati peraturan atau ketentuan yang diberikan oleh negara penanam modal. Kepentingan nasional sering diasosiasikan dengan tujuan nasional karena keduanya dianggap sama, seperti kepentingan pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan menarik investasi asing untuk mempercepat industrialisasi.

Konsep ini dipilih karena berhubungan dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Cina melalui program kerjasama ekonomi *Belt and Road Initiative*. Alasan pemilihan konsep kepentingan nasional untuk menganalisa topik ini dikarenakan kepentingan nasional masing-masing negara tidak bisa dipisahkan dari hubungan kerjasama yang dijalin oleh pemerintahan Indonesia dengan negara Cina.

